

Laporan Triwulan I Tahun 2020

Sekretariat IMDFF-DR (Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery)



Januari-Maret, 2020

Daftar Isi

I-	LATAR BELAKANG	2
II-	GARIS BESAR RENCANA KERJA SEKRETARIAT IMDFF-DR TAHUN 2020	3
III-	RENCANA TRANSISI IMDFF-DR MENJADI IDMF	4
	III.1 STRATEGI PERUBAHAN IMDFF-DR MENUJU IDMF DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	5
	III.2 STATUS DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	6
IV-	PENGELOLAAN DAN PENGUATAN SEKRETARIAT DI BNPB	8
V-	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH IMDFF-DR	9
VI-	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGELOLAAN HIBAH LAINNYA	15
VII-	KOORDINASI INTERNAL DAN PELAPORAN	17
VIII-	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
IX-	LAPORAN KEUANGAN PROYEK ENSURE TRIWULAN I TAHUN 2020 DALAM RANGKA Mendukung Kegiatan Sekretariat IMDFF-DR	22

I- Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 2018, Sekretariat IMDFF-DR telah diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretariat IMDFF-DR telah dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama BNPB Nomor 99.A/2019; 99.b/2019 dan SK Sestama BNPB Nomor 165.A/2019) tentang pelaksanaan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dan Penetapan Personil Pelaksana Sekretariat IMDFF-DR. Sekretariat yang dalam hal ini adalah Sekretariat Tim Teknis IMDFF-DR memberikan pelayanan konsultasi rencana penerimaan hibah berupa Barang/Jasa (in-kind) serta memberikan rekomendasi tatakelola hibah yang baik sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan capaian dan aspek strategis pada tahun 2019 yang perlu ditindaklanjuti, maka pokok-pokok substansi rencana kegiatan Sekretariat IMDFF-DR yang diusulkan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

1. Transisi IMDFF-DR menuju The Indonesia Disaster Management Fund

Diperkirakan pada Triwulan II-2020 terdapat perubahan fungsi dan kelembagaan IMDFF-DR sesuai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hibah.

2. Aspek Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat di BNPB

Pada prinsipnya, penguatan peran Sekretariat di BNPB terkait erat dengan kebijakan Pemerintah tentang the Indonesia Disaster Management Fund.

3. Pengendalian Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR

Dukungan untuk Sekretariat di BNPB masih perlu dilanjutkan untuk membantu BNPB selaku Executing Agency untuk melaksanakan koordinasi, sinergi dan pelaporan kepada Tim Teknis karena belum tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya.

4. Koordinasi dan Fasilitasi Penerimaan Hibah Lainnya

Terkait dengan belum tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, masih terdapat kemungkinan adanya usulan baru dari Donor/Pemberi Hibah, selain melanjutkan fasilitasi penerimaan hibah dari Pemerintah Qatar dan Pemerintah New Zealand pada tahun 2020.

II- Garis besar Rencana Kerja Sekretariat IMDFF-DR tahun 2020

Rencana garis besar Sekretariat IMDFF-DR disusun berdasarkan aspek strategis tahun 2019 yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2020. Rencana kerja ini di-evaluasi setiap triwulan untuk mengakomodasi dinamika perubahan peraturan, kelembagaan dan ketersediaan dana pendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB.

No	Deskripsi Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Rencana Transisi IMDFF-DR menuju IDMF												
1	Strategi perubahan IMDFF-DR												
2	Rekomendasi Tindak Lanjut												
B	Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat												
1	Pembaruan IMDFF-DR												
2	Pembaruan Organisasi Sekretariat												
3	Pembaruan Pedoman pengelolaan												
4	Pengelolaan situs IMDFF-DR												
5	Penyusunan materi publikasi												
C	Pengendalian Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan IMDFF-DR												
1	Pemantauan existing Project												
2	Pemantauan hibah lainnya (bila ada)												
3	Review Laporan Implementing Agency												
4	Pengakhiran ENSURE project 2020												
D	Rencana Penerimaan Hibah												
1	Reviu substansi usulan Qatar												
2	Reviu substansi usulan NZ												
3	Pembahasan draft MoU/NPH												
4	Reviu Usulan Donor lainnya (bila ada)												
5	Donor Coordination untuk penggalangan dana												
E	Koordinasi internal dan pelaporan												
1	Rapat Sekretariat (bulanan)	□	□		□	□	□	□	□		□	□	
2	Rapat Tim Teknis (per triwulan)						□						
3	Rapat Tim Pengarah (per semester)						■						
4	Pelaporan (Triwulan, Tahunan)				●			●			●		●

III- Rencana Transisi IMDFF-DR menjadi IDMF

Semenjak tahun 2019, isu perubahan IMDFF-DR menjadi the Indonesia Disaster Management Fund telah menguat. Berdasarkan kesepakatan Tim Pengarah IMDFF-DR di bulan Mei 2019, bahwa IMDFF-DR perlu disesuaikan nama dan

mandatnya, serta diperluas ruang lingkupnya mencakup seluruh aspek penanggulangan bencana. Nama yang disepakati adalah Indonesia Disaster Management Fund, dengan tetap difokuskan pada penerimaan hibah luar negeri, yang akan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana. Perubahan platform IMDFF-DR menjadi IDMF akan berdampak pada aspek-aspek payung hukum dan kelembagaan di Bappenas dan BNPB.

III.1 Strategi perubahan IMDFF-DR menuju IDMF dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Pembahasan tentang perubahan IMDFF-DR menuju The Indonesia Disaster Management Fund (IDMF) telah dilakukan sejak tahun 2018, untuk memindaklanjuti gagasan tentang perluasan ruang lingkup dari rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi penanggulangan bencana. Strategi perubahan IMDFF-DR menuju IDMF berdasarkan aspek pendukung strategis adalah sebagai berikut:

Aspek payung hukum	
Tindak lanjut terhadap MoU antara Pemerintah-United Nations dan World Bank tentang IMDFF-DR tahun 2009	<p>Opsi IDMF dapat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsi 1: IDMF masih menjadi fasilitas pendanaan dengan menggunakan modalitas Window dan Single Project dengan perluasan ruang lingkup menjadi bidang penanggulangan bencana • Opsi 2: IDMF menjadi sebuah Advisory Board, untuk mendukung One Gate Policy dalam pengelolaan hibah penanggulangan bencana
Payung hukum Tim Koordinasi PHPB sebagai pengendali IDMF	Penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis IDMF untuk menggantikan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR
Aspek Kelembagaan	

Organisasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PHPB	<ul style="list-style-type: none"> Keanggotaan inti Tim Koordinasi PHPB terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, BNPB dan Kementerian Keuangan, didukung pejabat Eselon 2 dan Eselon 2 yang sesuai dengan bidang perencanaan, pengendalian dan pendanaan penanggulangan bencana pedoman
Organisasi Sekretariat PHPB	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi PHPB ditetapkan berdasarkan fungsi dan peranan kelembagaan yang ditetapkan dalam SK Tim Koordinasi PHPB
Aspek Pendanaan	
Aspek pendanaan	Sumber dan jenis pendanaan kegiatan Tim Koordinasi PHPB perlu disepakati oleh Bappenas dan BNPB

III.2 Status dan rekomendasi tindak lanjut

Aspek Payung Hukum		
Perubahan MoU antara Pemerintah-United Nations dan World Bank tentang IMDFF-DR tahun 2009	Status pada Triwulan I-2020 <ul style="list-style-type: none"> Pengakhiran Proyek ENSURE-UNDP terkait dengan kewajiban pelaporan UN Window World Bank Window telah berakhir kewajiban pelaporannya setelah mentransfer sisa dana pada WB 	Rekomendasi Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan awal tentang tindak lanjut IMDFF-DR pada awal Triwulan II-2020 terutama untuk mengantisipasi pembentukan Tim Koordinasi PHPB

	Window pada awal tahun 2019 kepada UNDP atas permintaan Tim Pengarah	
Payung hukum Tim Koordinasi PHPB pelaksana IDMF	Status pada Triwulan I-2020 Draft SK MPPN/Kepala Bappenas telah diusulkan sejak akhir tahun 2019	Rekomendasi Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> • Memantau proses penerbitan SK pada Biro Hukum Bappenas
Aspek Kelembagaan		
Organisasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PHPB	Status pada Triwulan I-2020 <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi awal tentang Tim Koordinasi PHPB kepada anggota inti tertunda oleh kebijakan pembatasan akibat pandemi Covid19 • Tim Koordinasi PHPB belum terbentuk 	Rekomendasi Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> • Memantau proses penerbitan SK pada Biro Hukum Bappenas
Menyusun Pedoman Pelaksanaan Tim Koordinasi PHPB	Status pada Triwulan I-2020 <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman komunikasi untuk pengelolaan Single Project telah disusun • Pedoman Pelaksanaan Tim Koordinasi PHPB menunggu terbentuknya IDMF 	Rekomendasi Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman komunikasi di uji coba bagi pengendalian existing Single project yang dikoordinasikan IMDFF-DR dan rencana penerimaan hibah baru
Organisasi Sekretariat PHPB di BNPB	Status pada Triwulan I-2020 Sekretariat PHPB di BNPB belum terbentuk	Rekomendasi Tindak Lanjut Memantau proses penerbitan SK pada Biro Hukum Bappenas

Aspek Pendanaan		
Sumber-sumber pendanaan kegiatan IDMF	Status pada Triwulan I-2020 Belum teridentifikasi	Rekomendasi Tindak Lanjut Pembahasan awal pada forum Tim Teknis IMDFF-DR pada Triwulan II-2020

IV- Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat di BNPB

Pengelolaan dan penguatan Sekretariat di BNPB erat kaitannya dengan rencana transisi IMDFF-DR menjadi IDMF. Status pengelolaan dan penguatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB pada Triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

Faktor strategis	Target capaian	Status pada Triwulan I-2020
Aspek payung hukum	Terbitnya SK Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana untuk menggantikan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun Sekretariat IMDFF-DR di BNPB saat ini berada pada <i>status quo</i>, namun dukungan dari Bappenas tetap berlanjut untuk pelaksanaan rencana kerja Triwulan I-2020 • Opsi terbaik untuk menghapus <i>status quo</i> adalah pembaruan SK Sestama BNPB trntang pelaksanaan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB
Aspek organisasi dan pendukung kinerja Sekretariat	Terbentuknya organisasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PHPB	Tertunda karena menunggu terbitnya SK Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim

Faktor strategis	Target capaian	Status pada Triwulan I-2020
		Koordinasi PHPB. Meskipun demikian, organisasi Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR masih efektif mendukung kegiatan IMDFF-DR
	Pengembangan Situs IDMF	Pembahasan lanjutan dengan Pusdatinkom BNPB tertunda karena kebijakan pembatasan akibat terjadinya pandemi Covid19, perlu dilanjutkan pada Triwulan II-2020
	Peningkatan kinerja Sekretariat	Konsultan teknis pendukung Sekretariat masih disediakan melalui Proyek ENSURE-UNDP
Aspek pendanaan	Telah teridentifikasi sumber-sumber pendanaan kegiatan Sekretariat	Sumber pendanaan utama masih disediakan Proyek ENSURE – UNDP yang diperkirakan berakhir pada Triwulan III-2020

V- Perkembangan Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR

Saat ini hibah-hibah yang sedang berjalan dan dikoordinasikan oleh IMDFF-DR adalah Proyek ENSURE dan Proyek PETRA dengan implementing agency UNDP dan executing agency BNPB. Berikut disampaikan ringkasan capaian pelaksanaan hibah-hibah tersebut, sebagai berikut:

1. Proyek Proyek Enhancing the IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post-Disaster Recovery Governance (ENSURE)

Aspek	Target Capaian s.d Q1-2020	Status
Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Melaksanakan Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan dan pemda dalam membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya.	Rapat koordinasi bersama UNDP untuk pemantauan perkembangan pelaksanaan hibah dibawah koordinasi IMDFF-DR pada Proyek ENSURE dan proyek PETRA telah terlaksana melalui aplikasi Zoom meeting pada tanggal 31 Maret 2020. Beberapa rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan dan pemda dan stakeholder terkait lainnya yang direncanakan pada dilaksanakan pada Q1-2020 tertunda karena pandemic covid19.
Penguatan Sekretariat IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan ruangan dan pengadaan peralatan pendukung kantor Sekretariat IMDFF-DR di BNPB. • Penyediaan tenaga teknis pendukung Sekretariat IMDFF-DR di BNPB untuk keperluan penyusunan materi koordinasi, analisis dan pelaporan sudah terlaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang dan peralatan Sekretariat di BNPB telah tersedia. • Tenaga teknis pendukung untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat sudah terkontrak.
Penguatan Publikasi dan Sosialisasi	Integrasi website IMDFF-DR ke dalam website BNPB	Sekretariat IMDFF-DR sudah berkoordinasi Pusdatinkom BNPB untuk proses integrasi website IMDFF-DR ke dalam website BNPB.
Monev dan Pelaporan	Penyusunan laporan IMDFF-DR	Draft laporan IMDFF-DR tahun 2019 dan Q1-2020 telah tersusun. Sekretariat akan menyampaikan laporan IMDFF-DR kepada Tim Teknis dan Tim Pengarah.

2. Proyek Sulawesi-Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

No	Lokasi	Kegiatan	Capaian	Status
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Output 1: Rekonstruksi 13 unit infrastruktur publik (1 puskesmas, 8 pustu dan 4 SMKN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan DED 13 infrastruktur publik telah selesai dilakukan oleh konsultan desain dan pengawasan PT. Arkonin EMP joint venture PT. Dacrea Engineering Consultants. 2. Badan Geologi telah selesai melakukan survey di 13 lokasi di NTB. Hasil survei dan rekomendasi telah dipresentasikan kepada Sekretariat IMDFF-DR pada tanggal 30 Januari 2020 di Jakarta dan kepada pemerintah daerah NTB pada tanggal 12 Februari 2020 di Mataram. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses persiapan tender konstruksi 13 infrastruktur publik. Sehubungan dengan situasi COVID-19, beberapa aspek pengadaan harus ditinjau kembali terutama dalam mengantisipasi risiko selama tender konstruksi dan pekerjaan konstruksi, yang berdampak pada penundaan atau keterlambatan proses rekonstruksi dari jadwal semula yang direncanakan. 2. UNDP mengusulkan tambahan kegiatan rekonstruksi Pustu Gapuk di Lombok. Sekretariat mengarahkan agar mengoptimalkan anggaran pada kegiatan yang telah diidentifikasi pada output 1 dan output 2 tanpa penambahan kegiatan baru.
		Output 2:	1. Pada tanggal 12-14 Februari 2020 Sekretariat telah melaksanakan	1. UNDP telah memilih 2 CSO sebagai mitra pelaksana di

No	Lokasi	Kegiatan	Capaian	Status
		Pemulihan infrastruktur komunitas pendukung mata pencaharian.	koordinasi dan kunjungan lapangan untuk verifikasi usulan kegiatan yang akan didanai. Dari 10 usulan kegiatan terdapat 3 usulan kegiatan yang sesuai dengan <i>readiness criteria</i> yang menjadi pertimbangan untuk didanai, yaitu: 1) Saluran Irigasi Pertanian Orong Sempade, Kab. Lombok Timur, Kec. Sembalun, Desa Sajang; 2) Jaringan Pipa Air Bersih Birisan Nangka, Kab. Lombok Utara, Kec. Bayan, Desa Sambik Elen; dan 3) Warung Serba Ada (Commodity Shop) /Pasar Desa Genggelang, Kab. Lombok Utara, Gangga, Desa Genggelang.	lapangan, Perkumpulan Paluma Nusantara untuk Lombok Utara and Yayasan Wahana Visi Indonesia untuk Lombok Timur. 2. Pelaksanaan kegiatan oleh mitra CSO di lapangan tertunda sehubungan dengan pandemi COVID-19. 3. Proses verifikasi terhadap 6 usulan infrastruktur komunitas masih tertunda sehubungan dengan pandemi COVID-19.
2.	Provinsi Sulawesi Tengah	Output 1: Rekonstruksi 27 infrastruktur publik (2 rumah sakit, 2 puskesmas, 21 sekolah dan 2 tempat pengolahan sampah/TPA)	1. Konsultan desain dan pengawasan telah dikontrak untuk masing-masing paket sub-proyek, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sub-proyek RS. Anutapura dan RS Torabelo oleh PT. Arkonin EMP • Sub-proyek TPA Kawatuna dan Kabonga oleh PT. Arkonin joint venture dengan PT. Indokoei International. 	1. Sub-proyek RS. Anutapura dan RS Torabelo: DED telah selesai disusun. Proses persiapan tender konstruksi, tender konstruksi yang diperkirakan akan dimulai pada awal Q2-2020. 2. Sub-proyek 21 sekolah Pendidikan dan 2 puskesmas: penyusunan DED, tender

No	Lokasi	Kegiatan	Capaian	Status
			<ul style="list-style-type: none"> • Sub-proyek 21 sekolah Pendidikan dan 2 puskesmas oleh PT. Yodya Karya JV dengan PT Bumi Harmoni Indoguna & PT Cakrabuana Consultants. 2. Pengadaan transformer listrik 1000 kVA untuk pemulihan pasokan listrik di RS Anutapura Kota Palu telah selesai. Sehingga memungkinkan rumah sakit untuk mengoperasikan peralatan medisnya pada kapasitas penuh yang bertepatan dengan momentum rumah sakit yang ditugaskan sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. 3. Badan Geologi telah selesai melakukan survey di 28 lokasi di Sulawesi Tengah. Hasil survei dan rekomendasi telah dipresentasikan kepada Sekretariat IMDFF-DR pada tanggal 19 Februari 2020 di Jakarta dan kepada pemerintah daerah Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Februari 2020 di Palu. Survei detail lanjutan pada 9 lokasi juga telah 	<p>konstruksi diperkirakan dimulai pada akhir Q2-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Sub-proyek TPA Kawatuna dan Kabonga: penyusunan DED, tender konstruksi diperkirakan dimulai pada akhir Q2-2020 4. Terdapat perubahan sasaran kegiatan dari rencana semula, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • SDN 21 Sirenja, dikeluarkan dari target karena akan dibangun oleh Kementerian PUPR, dan penggantinya telah diusulkan menjadi SMPN 3 Sirenja. • Sentra Kain Tenun Donggala, dikeluarkan dari target karena data kerusakan tidak sesuai dengan readiness criteria, penggantinya diusulkan menjadi Pasar Sibado, <p>Usulan perubahan tersebut belum diverifikasi oleh Sekretariat IMDFF-DR</p>

No	Lokasi	Kegiatan	Capaian	Status
			diselesai dilakukan dan hasilnya telah disampaikan kepada konsultan desain.	sehubungan dengan pandemic Covid19. 5. Sehubungan dengan pandemi covid19, <i>time schedule</i> pelaksanaan proyek PETRA di NTB dan Sulawesi Tengah diperkirakan akan bergeser dari target yg direncanakan. Pergeseran waktu sehubungan terbatasnya gerak tim lapangan dalam proses tender dan verifikasi lapangan, termasuk konsultasi desain dengan pihak-pihak terkait.
		Output 2: Pemulihan infrastruktur komunitas pendukung mata pencaharian.	1. Pada tanggal 26-27 Februari 2020, Sekretariat IMDFF-DR bersama pemda Kab.Sigi dan UNDP telah melaksanakan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk verifikasi usulan kegiatan yang akan didanai. Dari 9 usulan kegiatan yang ditinjau, terdapat 4 usulan kegiatan yang sesuai dengan <i>readiness criteria</i> untuk menjadi pertimbangan untuk didanai, yaitu: 1) Jembatan	1. UNDP telah menunjuk Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia sebagai pelaksana lapangan di Kab. Sigi. 2. Pelaksanaan kegiatan oleh mitra CSO di lapangan tertunda sehubungan dengan pandemi COVID-19.

No	Lokasi	Kegiatan	Capaian	Status
			Gantung, Dusun 1 Tuva, Desa Tuva. Kec. Gumbasa; 2) Daerah Irigasi Tuva, Desa Tuva, Kec. Gumbasa; 3) Pasar Omu, Desa Omu, Kec. Gumbasa; 4) Jaringan irigasi desa Jono, Desa Jono & Wisolo, Kec. Dolo Selatan.	

VI- Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Lainnya

Beberapa kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengelolaan Hibah lainnya yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR diantaranya:

1. Rencana hibah baru dari Pemerintah Qatar (berdasarkan Surat Kedubes Qatar tanggal 5 Juli 2019 kepada KEMENLU RI) untuk pemulihan di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (sebesar USD 5.000.000);
2. Rencana hibah baru dari Pemerintah New Zealand (berdasarkan Surat Kedubes Selandia Baru tanggal 14 Februari 2019 kepada Ketua Tim Pengarah IMDFF-DR di BAPPENAS) untuk pemulihan di Sulawesi Tengah (sebesar NZD 1.480.000)

Kedua rencana hibah baru tersebut menyetujui untuk pemanfaatan kapasitas IMDFF-DR dalam melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan hibah pascabencana. Adapun ringkasan kegiatan koordinasi selama Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Faktor strategis	Target capaian	Status pada Triwulan I-2020
1.	Koordinasi Bersama Sekretariat IMDFF-DR bersama Biro HOK, Direktorat PRR BNPB dan Direktorat terkait lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Substansi perubahan ToR dan Draft PA/ MoU dari Sekretariat melalui rapat koordinasi bersama Biro/ Direktorat terkait dalam membahas Hibah NZ dan Qatar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembahasan Revisi ToR kegiatan dan Substansi Partnership arrangement Hibah NZ bersama Biro HOK dan Biro Perencanaan melalui Rapat sekretariat • Pembahasan Substansi Naskah Perjanjian Hibah (NPH)/ MoU Hibah Qatar belum terlaksana karena terjadinya pandemi covid 19
2.	Reviu substansi usulan Qatar, hibah barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Draft MoU telah direviu Direktorat Pendanaan LN Bilateral Bappenas, telah disepakati bahwa BNPB menjadi Executing Agency • Substansi usulan Qatar belum dirinci dalam draft MoU sehingga belum dibahas Biroren BNPB 	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB menyarankan Qatar memberikan hibah berupa uang, Namun Pemerintah Qatar hanya akan menghibahkan barang dan jasa. • Pembahasan lebih lanjut belum terlaksana karena terjadinya pandemi Covid19
3	Reviu substansi usulan NZ, hibah jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Draft PA telah dibahas bersama Sekretariat • Surat usulan pembaruan PA telah disampaikan NZ kepada Deputi RR BNPB • Masih menunggu respon dari Deputi RR, substansi usulan RR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan PA lebih lanjut belum terlaksana karena pandemi Covid19

No	Faktor strategis	Target capaian	Status pada Triwulan I-2020
		belum dibahas dengan Biroren BNPB	
4	Pelaksanaan Kegiatan Hibah NZ melalui UGM	Monitoring dan Partisipasi Pelaksanaan output 2 Pelatihan Post Earthquake Safety of Building difasilitasi oleh UGM pada 16-20 Maret 2020 di Kota Palu	Pelaksanaan training telah mengundang Sekretariat dan BNPB pada 13 Maret 2020, namun dibatalkan karena pandemi Covid19.
5	Pembahasan draft MoU Qatar dan PA NZ	Pembahasan dengan Biro HOKS dan Direktorat PRR BNPB belum terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Biro HOKS menunggu respon direktorat terkait (Direktorat PRR) selaku penerima disposisi dari Deputi RR BNPB • Kepala sekretariat telah melaksanakan Pertemuan Informal bersama Biro HOKS dan Direktorat PRR namun belum ada rencana tindak lanjut hingga pandemi Covid19.
6	Rapat Koordinasi dan Pelaporan Hibah	Akan dilaksanakan pada 13 Februari 2020	Belum terlaksana karena pandemi Covid19

VII- Koordinasi Internal dan Pelaporan

Selama Triwulan I-2020 telah dilaksanakan rapat sekretariat dengan jadwal, agenda dan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
1	14 Januari 2020, di Sekretariat, Agenda : Rakor Persiapan Project Board Meeting ENSURE dan PETRA dalam Kerangka IMDFFDR	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Persiapan PBM ENSURE & PETRA diagendakan pada pertengahan Februari 2020. • Rencana Verifikasi Output 2 pemulihan bidang Ekonomi PETRA di NTB, disampaikan 10 usulan untuk diverifikasi lebih lanjut. Direncanakan pada minggu Februari 2020 • Rencana Aktifasi Portal IMDFF-DR telah dikoordinasikan dengan Pusdatinkom BNPB • Keberlanjutan dukungan tim teknis IMDFF-DR
2	22 Januari 2020, di Sekretariat, Agenda : Weekly Meeting Perkembangan Kegiatan ENSURE dan PETRA dibawah Koordinasi IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Updated kegiatan PETRA, rencana Presentasi Hasil Final BG untuk NTB pada 30 Januari di Jakarta • Rencana Persiapan Verifikasi Komponen 2 di NTB pada minggu kedua Februari 2020.
3	6 Februari 2020, di sekretariat, Agenda: Pembahasan perkembangan Hibah NZ dan Perkembangan Kegiatan ENSURE dan PETRA dibawah Koordinasi IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembahasan Revisi ToR dan Draft PA Hibah NZ (senilai NZD 1,48juta) bersama Biro HOKS, Biro perencanaan dan NZMFAT • Penyampaian Draft SOP komunikasi antara sekretariat, BAPPENAS, BNPB dan UNDP dalam pelaksanaan single project.

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
4	11-14 Februari 2020, Partisipasi Sekretariat dalam kegiatan verifikasi Output 2 pemulihan bidang ekonomi PETRA di NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan partisipasi Tim sekretariat telah disampaikan kepada Tim Teknis.
5	25-27 Februari 2020, Partisipasi Sekretariat dalam kegiatan verifikasi Output 2 pemulihan bidang ekonomi PETRA di Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan partisipasi Tim sekretariat telah disampaikan kepada Tim Teknis.
6	30 Maret 2020, Via Virtual Meeting, Keberlanjutan Sekretariat dan perkembangan kegiatan PETRA di NTB dan Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan untuk penyesuaian rencana kerja sekretariat dan ENSURE disebabkan pandemi Covid19. • Penyesuaian agenda kerja PETRA Project disebabkan pandemi Covid19. • Rapat Sekretariat akan dilaksanakan secara virtual. • Monitoring dan verifikasi yang belum terlaksana akan dilaksanakan secara virtual.

VIII- Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan pelaksanaan rencana kerja IMDFF-DR pada Triwulan I-2020 dan rekomendasi tindak lanjut untuk Triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

No	Pelaksanaan pada Triwulan I-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan II-2020
1	Rencana Transisi IMDFF-DR menjadi IDMF	
	Pembentukan IDMF ditetapkan melalui keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas	Memantau proses penerbitan SK MPPN/Kepala Bappenas tentang Tim Koordinasi PHPB
	Identifikasi sumber pendanaan kegiatan Tim Koordinasi PHPB	Bappenas dan BNPB perlu melakukan pembahasan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang syah
2	Pengelolaan dan penguatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB	
	Meskipun organisasi Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dalam keadaan <i>status quo</i> , Bappenas tetap mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun 2020	Opsi terbaik untuk menghapus <i>status quo</i> dan melaksanakan komitmen BNPB adalah pembaruan SK Sestama BNPB tentang pelaksanaan Sekretariat IMDFF-DR tahun 2020
	Pengelolaan situs IMDFF-DR	Melakukan pembahasan lanjutan secara virtual dengan Pusdatinkom BNPB
	Dukungan pendanaan (existing) bagi kegiatan Sekretariat IMDFF-DR	BNPB selaku Executing Agency melakukan pembahasan dengan UNDP sebagai Implementing Agency Proyek Ensure tentang rencana pengakhiran proyek dan persiapan penyusunan BAST
3	Perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah yang dikoordinasikan IMDFF-DR	
	Prodoc ENSURE telah berakhir pada Desember 2019.	Perlu segera memproses perpanjangan Prodoc ENSURE untuk pemanfaatan sisa dana.

No	Pelaksanaan pada Triwulan I-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan II-2020
	Pelaksanaan Proyek PETRA di NTB dan Sulawesi Tengah diperkirakan akan mengalami keterlambatan dari target yang direncanakan.	Agar UNDP menyampaikan perubahan time schedule Proyek PETRA Project menyesuaikan pandemi Covid19. Monitoring perkembangan pelaksanaan proyek PETRA secara virtual
4	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Lainnya	
	Belum Terlaksananya Pembahasan Substansi Naskah Perjanjian Hibah (NPH)/ MoU Hibah Qatar karena terjadinya pandemi Covid19	Dalam periode pandemi covid19 pembahasan akan dilaksanakan secara virtual
	Qatar akan tetap memberikan hibah berupa barang dan jasa. belum terlaksana karena terjadinya pandemi Covid19	Monitoring dan Koordinasi secara virtual bersama Biro HOKS, Biro Perencanaan dan Direktorat terkait
	Pembahasan Teknis PA NZ-BNPB lebih lanjut belum terlaksana karena pandemi Covid19	Rakor informal secara virtual bersama Pusdiklat BNPB, dan Direktorat terkait lainnya untuk mendorong pembahasan substansi kegiatan Hibah.
	Rapat Koordinasi Pemantauan Hibah Luar Negeri dalam Penanggulangan Bencana ditunda karena pandemi Covid19.	Rapat Koordinasi diusulkan pelaksanaan secara virtual.
	Biro HOKS menunggu respon direktorat terkait (Direktorat PRR) selaku penerima disposisi dari Deputi RR BNPB, namun belum ada rencana tindak lanjut hingga pandemi Covid19.	Pelaksanaan lanjutan Koordinasi informal secara virtual guna percepatan pembahasan PA dan MoU selama periode pandemi covid19.
5	Koordinasi Internal dan Pelaporan	

No	Pelaksanaan pada Triwulan I-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan II-2020
	Pelaksanaan rapat Sekretariat sesuai keperluan	Melanjutkan pembahasan tentang isu yang tertunda pada tahun 2019 dan penyelesaian Laporan Triwulan I-2020
	Belum pernah diselenggarakan rapat Tim Teknis	Mendukung penyelenggaraan rapat Tim Teknis IMDFF-DR dengan agenda 1) pelaksanaan rencana transisi IMDFF-DR menjadi IDMF, 2) laporan Sekretariat tentang pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan Triwulan I-2020
	Belum pernah diselenggarakan rapat Tim Pengarah	Mendukung penyelenggaraan rapat Tim Pengarah dengan agenda: 1) Rekomendasi Tim Teknis tentang transisi IMDFF-DR menjadi IDMF, 2) Laporan Tim Teknis tentang pencapaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II-2020

IX- Laporan Keuangan Proyek ENSURE Triwulan I Tahun 2020 dalam rangka mendukung kegiatan Sekretariat IMDFF-DR

Dengan pertimbangan bahwa Proyek ENSURE dengan UNDP selaku Implementing Agency adalah sumber pendanaan kegiatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB. Adapun sisa dana hingga akhir Triwulan I Tahun 2020 sebesar USD 51.217, bersama ini disampaikan status keuangan per 31 Maret 2020 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini:

Standard Joint Programme Budget							
JOINT PROJECT BUDGET*							
Total Resources for the transfer (US\$)			203,626				
% of Indirect Costs			7				
Total Indirect Costs			14,254				
Total Direct Costs			189,372				
PROJECT BUDGET		ESTIMATED UTILIZATION OF RESOURCES (US\$)		Total Budget	Expenditure as of 31 March 2020	Commitment as of 31 March 2020	Balance
CATEGORY	Remaining Balance from MPTF	Remaining Balance from WB Trust Fund					
1	Staff and other personnel costs		80,000.00	80,000.00	41,579.56	26,070.97	12,349.47
2	Supplies, Commodities, Materials	60,000.00		60,000.00	48,841.72	0	11,158.28
3	Equipment, Vehicles and Furniture including Depreciation	10,000.00		10,000.00	10,155.73	-	(155.73)
4	Contractual Services			-			-
5	Travel	24,673.00	11,625.86	36,298.86	12,908.06	-	23,390.80
6	Transfers and Grants to Counterparts			-			-
7	General Operating and Other Direct Costs	10,000.00		10,000.00	5,382.82		4,617.18
	Total Programme Costs	104,673.00	91,625.86	196,298.86	118,867.89	26,070.97	51,360.00
8	Indirect Support Costs**	7,327.11		7,327.11	7,469.44		(142.33)
	TOTAL Pass-Through Amount Approved	112,000.11	91,625.86	203,625.97	126,337.33	26,070.97	51,217.67

Sumber : UNDP Indonesia, Maret 2020.